

## **Perkebunan Kopi Di Karesidenan Banyumas Masa Tanam Paksa Tahun 1836-1849**

Oleh: Maratu Latifa Yuan, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, [maratugagarin@gmail.com](mailto:maratugagarin@gmail.com)

### **Abstrak**

Tanaman kopi menjadi komoditi perdagangan utama sejak masa VOC. Pada abad ke-18 kopi Jawa menjadi primadona di pasar Eropa melebihi kopi Yaman, Arab dan Ethiopia. Melihat potensi kopi sebagai sumber penghasil dana yang menguntungkan bagi pemerintahan kolonial, kemudian pada tahun 1830 bersamaan dengan diberlakukannya Sistem Tanam Paksa maka dibukalah perluasan perkebunan kopi khususnya di Jawa. Sistem Tanam Paksa dibawah kekuasaan Gubernur Jendral van den Bosch pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari hasil produksi tanaman ekspor untuk kepentingan kas negeri Belanda. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui aktifitas dan perkembangan perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas pada tahun 1836-1849. Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kritis. Pertama, heuristik untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan perkembangan sosial-ekonomi terhadap perkembangan perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas. Kedua, adalah kritik sumber yang tujuan untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah. Ketiga, interpretasi adalah menasirkan berbagai fakta sejarah yang diperoleh dari kritik sumber. Keempat, historiografi yaitu suatu tulisan sejarah yang didasarkan pada fakta-fakta yang telah diperoleh. Dalam tahap akhir historiografi berisikan pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti geografis wilayah, iklim, aksesibilitas dan keadaan ekonomi Eropa pada saat itu. Para petani sebagai pekerja paksa di perkebunan kopi mendapatkan dampak paling besar baik di bidang sosial dan ekonomi. Bencana kelaparan dan kemiskinan di masyarakat Banyumas menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan, sedangkan pemerintah kolonial tidak dapat mengambil tindakan perbaikan. Pada akhirnya kekejaman sistem ini dapat dihapuskan setelah terdengar kepada kaum liberalis di negeri Belanda. Namun dengan dihapuskannya sistem ini, perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas tetap berjalan hingga akhir abad ke-19.

**Kata Kunci:** *Perkebunan, Kopi, Banyumas*

## **Coffee Plantation in the Residency of Banyumas during Cultuurstelsel Period of 1836-1849**

### **Abstract**

Coffee plants became the main trading commodity since the VOC era. In the 18th century Javanese coffee was excellent on the European market over Yemen, Arab and Ethiopian coffee. Seeing the potential of coffee as a source of profitable funds for the colonial government, then in 1830 together with the introduction of the Cultivation System, the expansion of coffee plantations, especially in Java, was opened. The Cultivation System under the authority of Governor General van den Bosch basically aimed to get as much profit as possible from the production of export crops for the benefit of the Dutch treasury. This study uses research methods critically. First, heuristics to gather information sources that are relevant to socio-economic developments on the development of coffee in the Banyumas Residency. Second, it is the right source to determine the authenticity and credibility of historical sources. Third, the interpretation is to describe various sources that come from criticism. Fourth, historiography called historical writing is issued on the facts that have been obtained. In the final stage historiography contains an introduction, the results of the study and conclusions. The results of this study indicate that the development of coffee plantations in the Banyumas Residency is much influenced by various factors such as geographical region, climate, accessibility and the state of the European economy at that time. Farmers as forced laborers on coffee plantations have the greatest impact both in the social and economic fields. Famine and poverty in the Banyumas community is unavoidable, while the colonial government cannot take corrective action. In the end the cruelty of this system could be abolished after it was heard to liberals in the Netherlands. But with the abolition of this system, coffee plantations in the Banyumas Residency continued until the end of the 19th century.

**Key words:** *Plantation, Coffee, Banyumas.*

## PENDAHULUAN

Masuknya bangsa Barat khususnya bangsa Belanda ke Indonesia telah membawa berbagai perubahan di berbagai bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya. Berbagai sistem politik yang dilaksanakan sebagian besar sangat berpengaruh terhadap berbagai sektor yang terkait dengan kegiatan ekonomi demi kemakmuran negeri Belanda, salah satunya adalah kebijakan pengadaan perkebunan.

Jauh sebelum pemerintah kolonial Belanda datang ke Indonesia, masyarakat pribumi telah mengenal sistem bercocok tanam. Sistem perkebunan tradisional biasanya diwujudkan dalam bentuk usaha kecil, tidak padat modal, penggunaan lahan terbatas, sumber tenaga kerja berpusat pada anggota keluarga, kurang berorientasi pada pasar, dan lebih berorientasi pada kebutuhan subsistem.<sup>1</sup> Dalam sistem kolonial, perkebunan diwujudkan dalam bentuk usaha pertanian skala besar dan kompleks, bersifat padat modal, penggunaan areal pertanian luas, organisasi tenaga kerja besar, serta penanaman tanaman komersial yang

---

<sup>1</sup>Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1991), hlm. 67.

ditujukan untuk komediti ekspor dipasar dunia.<sup>2</sup>

Kekosongan kas kolonial Belanda akibat biaya yang harus ditanggung dalam membiayai berbagai pemberontakan di Negeri Belanda sendiri (pemberontakan Belgia)<sup>3</sup> maupun di tanah jajahan khususnya Perang Jawa atau *Java Oorlog*.<sup>4</sup> Akibat perang tersebut tidak hanya merugikan kas keuangan masing-masing pihak namun juga harta benda dan nyawa. Pemerintahan kolonial Belanda dalam memperbaiki keadaan di Surakarta dan Yogyakarta membentuk suatu komisi urusan tanah-tanah di kerajaan (*Commisie ter Regeling der Zaken*) di Surakarta. Pada tanggal 27 September ditandatangani perjanjian yang berisi pengubahan batas-batas Surakarta dan Yogyakarta meliputi daerah-daerah Timur yaitu Kediri dan Madiun serta daerah-daerah Barat yaitu Banyumas dan Bagelen menjadi bagian dari wilayah kekuasaan kolonial Belanda.

Berdasarkan Revolusi Dewan Hindia Belanda tanggal 22 Agustus 1831 Nomor 1 dibentuklah Karesidenan Banyumas yang wilayahnya terdiri dari

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup> M.C. Ricklefs., *Sejarah Indonesia Modern*, (Yogyakarta: UGM Press, 1992), hlm.183.

<sup>4</sup>Sanusi Pane, *Sedjarah Indonesia II*, (Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1965), hlm. 81.

lima kabupaten yaitu; Kabupaten Banyumas, Kabupaten Ajibarang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Daya Luhur.<sup>5</sup>

Di tahun yang sama dengan ditetapkan Johannes van den Bosch sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda baru ke-43, maka dilaksanakan pula Sistem Tanam Paksa. Rencana van den Bosch yaitu tiap desa harus menyisihkan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor, khususnya kopi, tebu dan indigo, yang kemudian dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga pasti.<sup>6</sup> Banyumas sebagai karesidenan yang baru dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda ikut andil dalam melaksanakan kebijakan Sistem Tanam Paksa.

Tanaman kopi sendiri jauh sebelum sistem ini dilaksanakan sudah dikembangkan di beberapa daerah di Karesidenan Banyumas. Disebutkan dalam laporan milik Hallewijn bahwa di distrik Kertanegara (kabupaten Purbalingga) penduduknya telah menanam kopi. Namun tidak diketahui dari mana kopi tersebut berasal. Kopi yang telah ditanam penduduk jauh sebelum masa tanam paksa disebut sebagai kopi *Manasuka*. Kopi

*Manasuka* ini ditanam bebas oleh penduduk di sekitar pekarangan atau di kebun sekitar rumah, oleh orang Belanda kopi ini diberi istilah sebagai *paggerkoffij*. Kopi *pager* banyak ditanam di pinggir jalan dan sepanjang lorong kampung sebagai sumber penghasilan tambahan bagi penduduk desa.

Tahun pertama berjalannya Sistem Tanam Paksa dapat dikatakan berhasil karena dapat menutup seluruh hutang negeri Belanda terhadap Inggris. Namun dibalik kekayaan orang-orang Belanda yang semakin melimpah, masyarakat pribumi sebagai pekerja paksa malah semakin jatuh.

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam melaksanakan penelitian ilmiah akan dibutuhkan metode dalam pengerjaannya dan penelitian ini menggunakan metode sejarah atau metode historis. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>7</sup>

Heuristik adalah kegiatan mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Sumber atau data sejarah yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis

---

<sup>5</sup>Sri Margana & M. Nursam, ed., *Kota-kota di Jawa: Identitas Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*, (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 21.

<sup>6</sup>M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 183.

---

<sup>7</sup>Louis Gottschlak, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Terj. Nugroho Notosusanto, Cet.4, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 39.

sejarah yang akan ditulis.<sup>8</sup> Berdasarkan bentuk penyajiannya sumber-sumber sejarah terdiri atas arsip, dokumen, buku, majalah, jurnal, surat kabar, dan lain-lain. berdasarkan sifatnya sumber sejarah terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindra yang lain, orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakan.<sup>9</sup> Sumber sekunder adalah kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata atau seseorang yang tidak hadir pada waktu terjadinya peristiwa.<sup>10</sup>

Setelah sumber dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah kritik sumber. Kritik ekstern dapat dilakukan dengan cara mengecek bentuk fisik sumber dari kertas, tinta, tulisan, gaya, bahasa, ungkapan, kalimat, atau kata-katanya. Kritik intern adalah untuk meneliti kredibilitas sumber agar dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik intern bertujuan menyeleksi informasi yang

terkadung dalam sumber sejarah dapat dipercaya atau tidak kebenarannya.<sup>11</sup>

Interprestasi atau penafsiran sering disebut sebagai subjektifitas, karena pada tahap inilah konstruksi pemikiran penelitian dibentuk dan kemudian terjadi perbenturan ideologis.<sup>12</sup> Dari data yang bervariasi dapat dianalisis setelah ditarik secara induktif sehingga dapat disimpulkan. Setelah bukti-bukti dari setiap bagian sumber sejarah didapatkan, maka akan dapat digabungkan dengan suatu proses sintesis.

Langkah terakhir dalam penelitian sejarah adalah suatu rekontruksi sejarah. Historiografi adalah suatu tulisan sejarah yang didasarkan pada fakta-fakta dan bukti atau dokumen yang telah ditemukan, sehingga sejarawan harus memiliki integritas dan objektifitas.<sup>13</sup> Eksplanasi yang baik adalah ketika peristiwa masa lalu direkontruksi tampak hidup di tengah kehidupan kita. Tahapan ini berfungsi untuk mengkomunikasikan hasil dari rekontruksi masa lalu tersebut. Dalam tahapan akhir historiografi berisikan pengantar, hasil penelitian dan kesimpulan.

---

<sup>8</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 73.

<sup>9</sup>Louis Gottschlak, *op.cit.*, hlm. 39.

<sup>10</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1982), hlm. 35.

---

<sup>11</sup>A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 66.

<sup>12</sup>Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 46.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 35.

## HASIL PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Wilayah Karesidenan Banyumas Tahun 1836-1849

Banyumas merupakan kabupaten dan juga berstatus sebagai ibukota karesiden yang wilayahnya berada di Provinsi Jawa Tengah sebelah barat daya. Karesidenan Banyumas berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah kabupaten lain. Batas wilayah Karesidenan Banyumas sebelah barat adalah Provinsi Jawa Barat, Priangan, Cirebon dengan Sungai Citanduy sebagai batas teritorialnya. Sebelah selatan dibatasi oleh pantai Samudera Hindia, sebelah tenggara berbatasan dengan daerah Bagelen (Kabupaten Kebumen). Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Kebumen.<sup>14</sup>

Secara sosio-historis wilayah Banyumas bagian barat merupakan wilayah perbatasan yang memiliki hubungan persaudaraan dengan Pakuan Parahyangan, Padjajaran. Hubungan ini terjalin sejak masa Kadipaten Pasirluhur. Wilayah Banyumas bagian timur memiliki hubungan historis *pangiwa* (garis perempuan) dari wilayah mancanegara

kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti kerajaan Majapahit II, Pajang, Mataram II, Kartasura, Surakarta dan Yogyakarta.<sup>15</sup> Tidak mengherankan jika pada masa awal masuknya kolonial masyarakat Banyumas masih sangat terikat oleh ikatan tradisional, baik ikatan desa maupun ikatan feodal.

Alat organisasi kehidupan ekonomi teratur dalam ikatan feodal terdiri dari hubungan-hubungan kekuasaan dan ketaatan yang ada pada kekuasaan raja-raja, bupati-bupati, kepala-kepala ataupun pejabat-pejabat pada lingkungan desa.<sup>16</sup> Penguasa lokal seperti mempunyai kedudukan istimewa tersendiri di lingkungan masyarakat. Hubungan seperti itu oleh para ahli antropologi disebutkan sebagai hubungan yang sifatnya seperti tuan dan anak buah atau *patron-client relationship*.<sup>17</sup> Sebagai *client*, rakyat di samping berkewajiban membayar pajak juga bertanggung jawab terhadap kerja

---

<sup>15</sup>Budiono Herusatoto, *op.cit.*, hlm. 15.

<sup>16</sup>D.H. Burger, *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Bhratara, 1983), hlm 95.

<sup>17</sup>Hayami, Y., & Kikuichi, M., *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kerlembagaan di Asia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1891), hlm. 14.

---

<sup>14</sup>Budiono Herusatoto, *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*, (Yogyakarta: LKIS, 2008), hlm. 13-14.

pelayanan kepada *patron*.<sup>18</sup> Sebaliknya, *patron* sering berperan sebagai pelindung terhadap bawahannya, dan *client* membalasnya dengan kesetiaan kepada keluarga tuan atau pemilik tanah.

Merupakan hal wajar bahwa hubungan sosial di Banyumas pada waktu itu adalah berpola hubungan *patron-client* dan penduduk desa terbagi dalam spektrum yang terdiri dari berbagai sub-kelas petani dari pekerja tanpa tanah milik hingga kepada tuan tanah yang tidak ikut bercocok tanam, sesuai dengan berbagai hak mereka atas pemilikan tanah. Berkaitan dengan itu, dapat diketahui struktur sosial masyarakat di Banyumas adalah sebagai berikut: petani kentol, petani baku, petani numpang dan petani rayat.<sup>19</sup>

Lalu-lintas perdagangan di Banyumas pada masa awal pelaksanaan tanam paksa kopi saat itu masih sederhana sekali. Beberapa pertukaran hasil tanah antar penduduk suatu desa ke desa lain memang sudah berjalan dan di pusat kota sudah ada pasar kecil. Kegiatan ekonomi

utamanya hanya untuk mencukupi kebutuhan sendiri sehari-hari dalam lingkungan yang kecil ini menyebabkan tingkat hidup yang rendah. Kehidupan ekonomi di Banyumas pada masa itu bisa dikatakan sama dengan kehidupan desa-desa di pegunungan atau tempat yang jauh terpencil dan terisolir dan hanya terhubung dengan jalan-jalan setapak kecil.<sup>20</sup>

Alat organisasi kehidupan ekonomi teratur ini terdiri dari hubungan kekuasaan raja-raja, bupati-bupati dan pejabat-pejabat di atas pemerintahan desa. Arus produksi barang dan jasa sebagian besar melalui ekonomi feodal. Pertama, kegiatan ekonomi dilakukan untuk kepentingan pemerintahan, baik itu di daerah raja-raja ataupun daerah kolonial Belanda. Menurut Van Vollenhoven, kegiatan ekonomi pada masa itu bukanlah untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi untuk memperkuat kekuasaan dan kekayaan raja-raja.<sup>21</sup>

Dengan perkembangan administrasi kolonial maka jumlah pegawai Eropa bertambah banyak dan

---

<sup>18</sup>W.R. Hugenholtz, "Taxes and Society: Regional Differences in Central Java around 1830", dalam Kartodirdjo, S. (ed.), *Agrarian History I*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983), hlm. 170.

<sup>19</sup>Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984), hlm. 297.

---

<sup>20</sup>Purnawan Basundoro, "Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1840-1940", *Tesis*, (Pascasarjana Prodi Sejarah FIB UGM, 1999), hlm. 40.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 97.

mereka terpenjar ke pedalaman.<sup>22</sup> Eksploitasi produksi tanaman kopi diawasi secara ketat oleh pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda selain berfungsi sebagai badan pemerintahan juga sebagai badan usaha. Pada kenyataannya tanam paksa melalui perkebunan-perkebunan kopi ini merupakan salah satu cara pemerintahan kolonial dalam memonopoli perdagangan sehingga dalam waktu yang relatif singkat mendapatkan keuntungan yang sangat besar untuk kas negeri Belanda.<sup>23</sup> Pejabat-pejabat Eropa berperan sebagai residen, asisten residen, kontrolir dan pengawas tanaman yang bertanggung jawab terhadap jalannya perkebunan.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan kegiatan penanaman wajib kopi ini tentunya tidak terlepas dari campur tangan dan pengawasan organisasi desa. Peran organisasi desa berfungsi sebagai pelaksana dalam proses mobilisasi sumber daya perekonomian agraris dan sangat efektif untuk meningkatkan produksi tanaman ekspor. Pengaruh kepala desa

sebagai perantara warga desa dengan dunia luar desa diperkuat dengan dilaksanakannya Sistem Tanam Paksa ini.<sup>25</sup> Sistem pemerintahan bersifat tidak langsung, yaitu sistem pemerintahan melalui kepala-kepala pribumi.

Penyelenggaraan sistem penanaman wajib kopi di tingkat pedesaan Banyumas seluruhnya masih dilakukan dengan perantara kepala desa, tidak mengherankan jika kemudian timbul penyalahgunaan kekuasaan. Kesenjangan sosial antara elit desa dengan rakyat jelata sangat jelas dan tidak bisa dihindari. Meskipun para elit desa telah mendapatkan komisi yang besar tetapi mereka masih memakan pembayaran pajak tanah yang dipungutnya semacam komisi dari rakyat, kemudian tidak disetorkan dan dipakai sendiri. Mereka secara sengaja menambah beban pemilik sawah dan petani pekerja paksa di perkebunan dengan maksud agar kemudian dapat dikuasainya sawah mereka, tetapi ada juga penduduk desa yang dibebaskan dari wajib kerja dan tanam paksa dengan pembayaran kepada kepala desa.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, Jilid I, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 307.

<sup>23</sup>Pieter Creutzberg & J.T.M. van Laanen, Peny., *Sejarah Statistik Indonesia*, (Jakarta: YOI, 1987), hlm. 238.

<sup>24</sup>Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *op.cit.*, hlm. 57.

---

<sup>25</sup>D.H. Burger, *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, (Jakarta: Pradnyapramita, 1962), hlm. 94.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 318.

## B. Perkembangan Perkebunan dan Penyerahan Wajib Kopi di Karesidenan Banyumas

Berdasarkan Resolusi No. 1 tanggal 22 Agustus 1831, usaha pemerintah kolonial Belanda untuk memperluas penanaman wajib kopi mulai giat dilaksanakan di Karesidenan Banyumas. Penduduk diwajibkan menambah tanaman kopi yang dilakukan dengan model kopi *pager*. Penanaman wajib kopi di Karesidenan Banyumas pada awalnya dikembangkan di dua kabupaten yaitu Purwokerto dan Purbalingga. Setiap rumah tangga di dua kabupaten itu diwajibkan untuk menanam dan memelihara pohon kopi milik pemerintah melalui model kopi *pager*. Kemudian disusul dengan mewajibkan penanaman kopi di setiap kabupaten, terutama di desa-desa yang dipandang cocok. Bibit kopi disediakan oleh pihak pemerintah kolonial Belanda, yang diserahkan kepada penduduk sesuai dengan luas pekarangan mereka.

Pihak pemerintah kolonial Belanda sangat antusias untuk memacu peningkatan penanaman wajib kopi di daerah pedalaman Banyumas. Hal ini tampak jelas dari upaya pemerintah untuk merangsang semangat kerja penduduk melalui Surat Edaran Gubernur Jendral No. 1618, yang ditujukan kepada para bupati di lingkungan Karesidenan Banyumas. Surat

edaran itu kemudian diingatkan kembali melalui Nota Residen tanggal 20 Februari 1832 yang menegaskan, bahwa penduduk di kabupaten-kabupaten akan dibebaskan dari pajak tanah selama 3 tahun apabila mereka memiliki tanaman kopi sebanyak 450 pohon.<sup>27</sup>

Kenyataannya usaha dalam memberi rangsangan semacam ini kurang begitu berhasil, sehingga pemerintah kolonial Belanda mencari cara baru dalam rangka meningkatkan jumlah tanaman kopi di Karesidenan Banyumas. Kemudian ditetapkan bahwa adanya tambahan model penanaman tanaman kopi untuk dengan memperluas sistem penanaman wajib kopi tidak hanya melalui kopi *pager* saja, tetapi juga dilakukan dengan sistem kopi kebun dan kopi hutan. Sistem kopi kebun (*tuin-koffij*) merupakan pembukaan perkebunan kopi di lahan-lahan kosong milik komunal atau milik desa. Sistem kopi hutan (*bosch-koffie*) merupakan penanaman kopi yang dilakukan di hutan-hutan cadangan milik desa yang letaknya agak jauh dari pemukiman. Sementara pohon tinggi yang ada tetap dibiarkan berdiri, kemudian semak-semak yang berada di bawahnya

---

<sup>27</sup>Tanto Sukardi, "Perubahan Sosial di Banyumas (1830-1900) Aplikasi Pembelajaran Nilai Sejarah Dalam Kerangka PIPS", Disertasi, (Bandung: UPI), hlm. 214.

ditebang dan di tanah terbuka itu kemudian ditanami pohon kopi.<sup>28</sup>

Untuk menggarap lahan dan mengurus tanaman digunakan tenaga kerja paksa yang direkrut dari penduduk desa-desa sekitar perkebunan, yang dikordinasikan oleh para kepala desa. Dikarenakan jarak antar hutan kopi ke desa sangat jauh maka para petani kopi terpaksa harus tinggal di gubug-gubug darurat yang didirikan dekat lokasi perkebunan.<sup>29</sup> Di Karesidenan Banyumas, perkebunan kopi dilakukan selain di atas tanah-tanah milik komunal yang telah dibagi-bagikan kepada para petani penggarap, juga ditanam di atas sawah yang rusak maupun tanah yang baru dibuka.<sup>30</sup>

Dalam perkembangannya sampai tahun 1836 di Karesidenan Banyumas tanaman kopi yang ditanam baik melalui model *pager*, perkebunan dan hutan kopi telah mencapai jumlah yang sangat besar.

---

<sup>28</sup>Jan Breman, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), hlm. 215.

<sup>29</sup>Koentjaraningrat, *op.cit.*, hlm. 3.

<sup>30</sup>Kano Hiroyoshi, 1984, "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa abad XIX", dalam Tjondronegoro, S.M.P. & Wiradi, G.(ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia), hlm. 49-50.

Residen Banyumas dalam laporannya menyatakan bahwa pada tahun sebelumnya gudang-gudang kopi belum dapat memenuhi jumlah target yang telah ditetapkan, ia diharapkan dapat mencapai target sebesar 30.000 pikul pertahun untuk dikumpulkan kepada gudang umum. Namun kenyataannya sesuai dengan isi laporan hasil pada tanggal 31 Desember 1836, pada akhirnya residen hanya dapat menyerahkan sebesar 27.507,41 pikul kopi.<sup>31</sup>

Pada tahun 1837 penyerahan wajib kopi ke gudang utama mengalami kelebihan dikarenakan ledakan kopi hutan yang tidak menguntungkan. Tiap gudang distrik tidak mendapatkan jumlah pikul kopi yang tepat dan pada saat yang bersamaan ditemukan output kopi mentah sebesar 9.190 pikul.

Penyerahan wajib kopi pada tahun 1838 mengalami kemunduran dari tahun sebelumnya yang berhasil memperoleh 35.250 pikul. Masalahnya adalah hujan pada tahun itu turun sangat deras dan berhari-hari tak kunjung surut, sehingga menyebabkan bunga dan buahnya jatuh tertiuip angin kencang, atau lebih parahnya dapat merusak dahan dan mencabut pohon dari tanahnya. Dalam mengatasi masalah ini, petani yakin bahwa penambahan

---

<sup>31</sup>ANRI Banjoemas, *Algemeen Verslag van Residentie Banjoemas 1836*, No. 4.10.

sementara dengan jumlah 110-112 pohon di tiap distrik di Banjarnegara dianggapnya cukup adil jika dibandingkan dengan jumlah pohon distrik lain. Kemudian pemerintah kolonial menambahkan 700-1100 pohon dan lebih banyak lagi pohon yang diperlukan.<sup>32</sup> Berakhirnya tahun 1838 yang cukup disayangkan dikarenakan pemerintah tidak dapat menyerahkan hasil penyerahan wajib kopi semaksimal mungkin. Pada tahun selanjutnya pemerintah dengan peraturan baru yang diharapkan dapat meningkatkan kembali jumlah penyerahan wajib kopi sesuai target.

Walaupun sempat mengalami penurunan, tetapi terjadi lonjakan jumlah penyerahan wajib kopi pada tahun 1839, yang mencapai 85.341 pikul. Diketahui bahwa setelah musim hujan panjang tahun sebelumnya, pemerintah kolonial Belanda mengatasinya dengan penanaman bibit kopi baru sebanyak 1100 pohon di tiap distrik. Kemudian grafik menunjukkan penurunan kembali yang cukup drastis pada tahun 1840 yaitu 28.096 pikul, pada tahun 1841 meningkat kembali menjadi 65.681 pikul.

Diketahui bahwa Kabupaten Purbalingga paling tidak produktif untuk perkebunan kopi, sedangkan Banjarnegara merupakan

kabupaten yang paling produktif. Dapat pula dinyatakan di sini bahwa produksi kopi yang hanya mencapai 29.367,79 pikul pada tahun 1845, telah meningkat menjadi 40.846 pikul pada tahun 1846.<sup>33</sup> Kemudian pada tahun 1847-1849 juga kembali mengalami penurunan. Penurunan jumlah penyerahan wajib kopi ini disebabkan terjadinya penurunan minat dan harga jual kopi di pasaran Eropa. Mengingat pasar internasional saat itu memiliki peran penting dalam perekonomian jelas memberikan dampak yang cukup besar terhadap perkebunan kopi sebagai produksi barang dagangan.

Pada perkembangannya, harga kopi di pasar Eropa kembali stabil sehingga penyerahan wajib kopi di Karesidenan Banyumas kembali meningkat pada tahun 1849 mendapatkan sebesar 40.264 pikul dan di tahun 1850 mulai stabil dan mantap menjadi 43.125 pikul. Meskipun begitu jumlah ini masih lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya.<sup>34</sup>

Persebaran jenis varietas kopi di Karesidenan Banyumas dipengaruhi oleh ketinggian tanah. Jenis kopi Arabica termasuk jenis kopi yang hanya dapat hidup pada ketinggian 1000-1700 meter

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>ANRI Banjoemas, *Algemeen Verslag van Banjoemas 1850*, No.6.3.

---

<sup>32</sup>ANRI Banjoemas, *Statistiek der Residentie Banjoemas 1838*, No. 8.2.

dpl.<sup>35</sup> Kopi Robusta mampu beradaptasi lebih baik dari pada kopi Arabika karena dapat tumbuh di daerah yang cangkupannya lebih luas dan lebih rendah.<sup>36</sup> Berdasarkan ketinggian wilayah, kopi Arabika ditanam di wilayah: distrik Batur, Karangobar dan Cahyana. Kopi Robusta ditanam di wilayah: distrik Singomerto, Banjarnegara, Purbalingga, Kertanegara, Purwokerto, Ajibarang, Jambu, Sokaraja, Banyumas, Purworejo, Dayaluhur, Majenang, Pegadingan dan Cilacap.

Sehubungan dengan harga serta biaya pengiriman, kopi yang telah selesai dipanen oleh para petani di kumpulkan terlebih dahulu ke lumbung atau gudang yang sudah disediakan di tiap distrik. Setelah terkumpul barulah siap dikirimkan ke gudang umum yang berada di distrik Cilacap, Kabupaten Dayaluhur. Kopi yang dikumpulkan kepada pemerintah kolonial dihitung per pikul. Harga tiap pikul kopi telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu sebesar f.7,50 dan f.12. Biaya transportasi lebih bervariasi, disesuaikan dengan jarak tempuh dari tiap gudang distrik ke gudang umum Cilacap.

---

<sup>35</sup>Setijadi Sastrapradja, dkk, *Tanaman Industri*, (Bogor: Lembaga Biologi Nasional-LIPI, 1978), hlm.67.

<sup>36</sup>Dewan Redaksi Penerbit Bhratara, *Tanaman Perdagangan*, (Jakarta: Bhratara, 1974), hlm. 11.

### **C. Dampak Sosial dan Ekonomi Perkebunan Kopi Terhadap Kehidupan Masyarakat di Karesidenan Banyumas**

Penyelenggaraan sistem penanaman wajib kopi di tingkat pedesaan Banyumas seluruhnya masih dilakukan dengan perantara kepala desa, tidak mengherankan jika kemudian timbul penyalahgunaan kekuasaan. Kesenjangan sosial antara elit desa dengan rakyat jelata sangat jelas dan tidak bisa dihindari. Meskipun para elit desa telah mendapatkan komisi yang besar tetapi mereka masih memakan pembayaran pajak tanah yang dipungutnya semacam komisi dari rakyat, kemudian tidak disetorkan dan dipakai sendiri. Mereka secara sengaja menambah beban pemilik sawah dan petani pekerja paksa di perkebunan dengan maksud agar kemudian dapat dikuasainya sawah mereka, tetapi ada juga penduduk desa yang dibebaskan dari wajib kerja dan tanam paksa dengan pembayaran kepada kepala desa.<sup>37</sup>

Sebagai akibat dari intervensi politik dan ekonomi kolonial ke dalam pedesaan di Karesidenan Banyumas melalui kegiatan tanam paksa perkebunan kopi secara berangsur-angsur telah terjadi perubahan sosio-kultural bagi masyarakat

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 318.

petani. Hubungan *patron-client* antar pemerintah kerajaan dengan daerah pun mulai terjadi pergeseran. Sebagai dampak umum dari perubahan sosial ini adalah terjadinya kemerosotan peran politik, ekonomi, sosial dan budaya keraton tradisional. Secara perlahan, peran tersebut digantikan oleh dominasi pemerintahan kolonial yang lebih modern.<sup>38</sup>

Dalam kenyataannya rakyat tidak menjalankan pekerjaan paksa di perkebunan kopi ini dengan secara suka rela, terlebih terdapat beban-beban lain yang menekan mereka. Rakyat pribumi harus bekerja keluar jauh dari desanya, dan mereka pula yang menyediakan makanannya sendiri. Pajak atas tanah yang diambil harus dibayarkan terus menerus.

Sistem Tanam Paksa bagaimanapun telah menciptakan usaha pertanian padat karya pada pihak pribumi serta usaha industri pertanian yang modal pada pihak penguasa Eropa atau asing. Beberapa dampak positif dari pelaksanaan tanam paksa perkebunan kopi di Banyumas antara lain yaitu terjadinya pembaruan dalam sistem administrasi pemerintahan desa akibat campur tangan

pemerintah kolonial. Pelaksanaan tanam paksa ini juga telah mengenalkan teknologi baru, terutama dalam pengenalan bibit-bibit tanaman perdagangan kopi jenis Arabika dan Robusta, beserta cara penanamannya. Selain itu, karena tuntutan peningkatan produksi, maka diadakan perbaikan atau pembuatan irigasi, jalan, dan jembatan yang memperlancar transportasi dan komunikasi antar daerah. Pembayaran *plantloon* (upah tanam) setelah menyerahkan hasil tanaman wajib dipandang sebagai pencetus metode penukaran tenaga dengan uang. Sistem Tanam Paksa melalui perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas telah menciptakan lalu lintas uang, suatu faktor ekonomi yang dapat mempercepat timbulnya ekonomi uang di pedalaman

## KESIMPULAN

Pada awalnya kopi ditanam di sekitar pekarangan rumah rakyat yang disebut sebagai kopi pager. Dalam merangsang pertumbuhan kopi sebagai komoditi utama yang diharapkan dapat meningkatkan keuntungan dan memenuhi uang kas bagi negeri Belanda pasca Perang Jawa, pemerintah kolonial Belanda menggalakkan penanaman kopi dengan dua sistem baru yaitu penanaman kopi kebun dan kopi hutan. Kopi kebun ditanam di lahan-lahan kosong milik komunal atau

---

<sup>38</sup>George D. Larson, *Masa Menjelang Revolusi Kraton dan Kehidupan Politik di Surakarta 1912-1942*, (Yogyakarta: UGM Press, 1990), hlm. 15.

milik desa, sedangkan kopi hutan ditanam di hutan-hutan cadangan milik desa.

Penyerahan wajib kopi hingga tahun 1836 setidaknya telah meningkat sedikit demi sedikit daripada tahun-tahun sebelumnya, meskipun belum mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Perkembangan penyerahan wajib pada tahun selanjutnya telah tercapai target. Namun bukan berarti pada tahun-tahun selanjutnya tidak mengalami masalah apapun. Sepanjang tahun dari 1836-1849, penyerahan wajib terus mengalami berbagai peningkatan dan penurunan jumlah yang cukup signifikan. Hal tersebut banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab, seperti masalah geografis wilayah, iklim, transportasi, aksesibilitas, penyelewengan dari berbagai pihak dan terjadinya penurunan minat dan harga jual kopi di pasar Eropa.

Pembukaan perkebunan kopi di Karesidenan Banyumas memberi berbagai dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, perkebunan kopi memberi rakyat khususnya para petani pekerjaan dan penghasilan meskipun tak seberapa untuk kehidupan mereka. Selain itu pembukaan lahan baru di hutan-hutan juga secara tidak langsung telah menciptakan pemukiman-pemukiman dan desa-desa baru. Dengan adanya Sistem Tanam Paksa perkebunan

kopi ini telah mengubah Banyumas yang sebelumnya merupakan wilayah mancanegara terluar dan pedalaman terisolir menjadi wilayah baru yang berkembang dan mulai mengenal kehidupan masyarakat modern.

Sebagai masyarakat dengan ikatan feodal yang kuat, hubungan para petani kelas bawah dengan para elit desa cukup kompleks. Kepala-kepala desa pribumi selaku pengawas jalannya perkebunan dan perdagangan berkerja dengan sewenang-wenang demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini cukup membuat para petani dan masyarakat Banyumas tertekan dengan segala kewajiban mereka terhadap pemerintah kolonial Belanda maupun kepala pribumi. Masalah ekonomi dan kesehatan yang buruk menyebabkan bertambahnya penderitaan masyarakat. Masalah kemiskinan dan kelaparan banyak terjadi di berbagai wilayah. Namun hal ini tidak menjadi fokus permasalahan yang segera diperbaiki oleh pemerintah kolonial Belanda hingga Sistem Tanam Paksa mulai diketahui oleh rakyat Belanda sebagai bentuk penyelewengan. Namun hingga akhir Sistem Tanam Paksa ini dihapuskan, penanaman tanaman kopi di Banyumas tetap berjalan hingga akhir abad ke-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Arsip

ANRI Banjoemas, *Algemeen Verslag van Residentie Banjoemas 1836*, No. 4.10.

ANRI Banjoemas, *Statistiek der Residentie Banjoemas 1838*, No.8.2.

ANRI Banjoemas, *Algemeen Verslag van Residentie Banjoemas 1850*, No.6.3.

### B. Buku

Budiono Herusatoto, *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*, Yogyakarta: LKIS, 2008.

Breman, Jan, *Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa 1720-1870*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.

Burger, D.H., *Sejarah Ekonomi Indonesia dari Segi Sosiologi Sampai Akhir Abad XIX*, Jakarta: Pradnyapramita, 1962.

\_\_\_\_\_, *Perubahan-Perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Bhratara, 1983.

Creutzberg, Pieter & van Laanen, J.T.M., Peny., *Sejarah Statistik Indonesia*, Jakarta: YOI, 1987.

Dewan Redaksi Penerbit Bhratara, *Tanaman Perdagangan*, Jakarta: Bhratara, 1974.

Elson, R.E., "Kemiskinan dan Kemakmuran Kaum Petani Pada Masa Tanam Paksa di Pulau Jawa", dalam Anne Booth, et. al., *Sejarah Ekonomi Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 1988

Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1974.

George Gonggrip, *Schet eener Economische geschiedenis van Nederland-Indie*, (Halem: De Erven F. Bohm, 1928),

Gottschlak, Louis, *Understanding History: A Primer of Historical Method*, Terj. Nugroho Notosusanto, Cet.4, *Mengerti Sejarah*, Jakarta: UI Press, 2008.

Hayami, Y., & Kikuichi, M., *Dilema Ekonomi Desa: Suatu Pendekatan Ekonomi terhadap Perubahan Kerlembagaan di Asia*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1891.

Hiroyoshi, Kano., 1984, "Sistem Pemilikan Tanah dan Masyarakat Desa di Jawa abad XIX", dalam Tjondronegoro, S.M.P. & Wiradi, G.(ed.), *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

Hughenoltz, W.R., "Taxes and Society: Regional Differences in Central Java around 1830", dalam Kartodirdjo, S. (ed.), *Agrarian History I*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1983.

Koentjaraningrat, *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1984.

Panekoek, A.J., *Outline of Geomorfology of Java*, Bandung: Balai Pendidikan Guru, 1952.

Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern*, Yogyakarta: UGM Press, 1992.

Sanusi Pane, *Sedjarah Indonesia II*, Jakarta: P.N. Balai Pustaka, 1965.

Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*, Jilid I, Jakarta: Gramedia, 1988.

Sartono Kartodirdjo & Djoko Suryo, *Sejarah Perkebunan Indonesia: Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991.

Setijadi Sastrapradja, dkk, *Tanaman Industri*, Bogor: Lembaga Biologi Nasional-LIPI, 1978.

Soedjito Irawan, *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia I*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1975.

Sri Margana & M. Nursam, ed., *Kota-kota di Jawa: Identitas Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial*, Yogyakarta: Ombak, 2010.

### C. Tesis & Disertasi

Purnawan Basundoro, "Transportasi dan Ekonomi di Karesidenan Banyumas Tahun 1840-1940", *Tesis*, Pascasarjana Prodi Sejarah FIB UGM, 1999.

Tanto Sukardi, "Perubahan Sosial di Banyumas (1830-1900) Aplikasi Pembelajaran Nilai Sejarah Dalam Kerangka PIPS", *Disertasi*, Bandung: UPI.

Yogyakarta, 22 November 2018

Dosen Pembimbing TAS



Dina Dwikurniarini, M.Hum.  
NIP. 19571209 198702 2 001

Mengetahui,  
Reviewer



Ririn Darini, M. Hum.  
NIP. 1974118 199903 2 001

